

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2020-2023

Nafisa Refalia¹, Nadia Puji Rahayu², Nur Nazwa³, Nurul Amalia Lubis⁴, Sartika Turnip⁵, Tiurmaida Sihite⁶

Universitas Palangka Raya, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: nfsarflia667@gmail.com¹, nadiapujra@gmail.com², nrnzwa09@gmail.com³,
nurulamalia.id02@gmail.com⁴, tikaturnip08@gmail.com⁵, cjktiurmaida.sihite@gmail.com⁶

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 14 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the Central Kalimantan Provincial Government through the 2020–2023 Budget Realization Report using the Regional Financial Independence Ratio, Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio, and Fiscal Decentralization Ratio. The research employs a quantitative descriptive approach using secondary data sourced from the Regional Budget Realization Report (APBD). The results reveal that the financial independence ratio remains in the consultative-delegative category and shows a fluctuating trend, indicating fiscal dependence on central government transfers. The PAD effectiveness ratio demonstrates a highly effective performance, consistently reaching 100% annually. The fiscal decentralization ratio falls into the moderate-high range, suggesting that although PAD contributes to regional revenue, it is not yet dominant but shows improvement across years. Overall, the financial performance of the Central Kalimantan Provincial Government is categorized as good in terms of PAD effectiveness, though fiscal independence still requires strategic improvement.

Keywords: Financial Performance, PAD, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Fiscal Decentralization.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Laporan Realisasi Anggaran (APBD) tahun 2020–2023 dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Rasio Desentralisasi Fiskal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kategori konsultatif hingga delegatif dan menunjukkan tren yang fluktuatif, mengindikasikan adanya ketergantungan fiskal terhadap transfer pemerintah pusat. Rasio efektivitas PAD menunjukkan kinerja sangat efektif dengan capaian 100% setiap tahun. Rasio desentralisasi fiskal berada pada kategori sedang hingga tinggi, yang menunjukkan bahwa meskipun PAD berkontribusi terhadap pendapatan daerah, kontribusi tersebut belum dominan namun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tergolong baik dalam aspek efektivitas PAD, meskipun kemandirian fiskal masih memerlukan upaya peningkatan secara strategis.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, PAD, Rasio Kemandirian, Efektivitas PAD, Desentralisasi Fiskal.

PENDAHULUAN

Anggaran adalah dokumen yang merefleksikan kondisi keuangan suatu entitas, berisi data mengenai pemasukan, pengeluaran, serta kegiatan yang dilakukan dalam satu masa anggaran. Dalam lingkup pemerintahan daerah, anggaran ini diimplementasikan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berperan sebagai alat pokok untuk merencanakan, menjalankan, serta mengevaluasi program pembangunan daerah.

Komposisi APBD yang mencakup unsur pemasukan, pengeluaran, dan pendanaan berfungsi sebagai ikhtisar situasi keuangan daerah dalam menjalankan otonomi selama satu tahun anggaran.

Untuk menilai tanggung jawab dan mutu pengaturan keuangan daerah, pemerintah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik. LKPD terbentuk dari Laporan Realisasi Anggaran, neraca, laporan operasi, arus kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang bertugas sebagai instrumen penilaian performa keuangan daerah secara obyektif. Dengan LKPD, bisa dievaluasi kapasitas pemasukan daerah, pola pengeluaran, serta efisiensi dalam mengelola dana publik.

Salah satu metode yang sering dipakai untuk menilai performa keuangan daerah adalah evaluasi rasio keuangan. Rasio tersebut mencakup rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio derajat desentralisasi fiskal, dan rasio kesesuaian belanja. Evaluasi rasio ini menyediakan gambaran kuantitatif tentang posisi dan kemampuan fiskal daerah serta menjadi landasan dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih strategis dan lestari.

Provinsi Kalimantan Tengah sebagai daerah dengan kegiatan ekonomi yang tumbuh cepat menghadapi berbagai dinamika fiskal sepanjang masa 2020–2023. Pandemi COVID-19 dan tahap pemulihan ekonomi membawa perubahan besar terhadap pemasukan dan pengeluaran daerah, termasuk fluktuasi realisasi PAD, ketergantungan pada dana transfer, serta perubahan komposisi belanja daerah. Situasi ini memerlukan penilaian komprehensif untuk mengetahui seberapa jauh pemerintah provinsi bisa mempertahankan stabilitas fiskal, meningkatkan efektivitas PAD, serta mengoptimalkan belanja daerah dalam mendukung pembangunan.

Dengan begitu, evaluasi terhadap performa keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui rasio keuangan menjadi krusial untuk memberikan gambaran obyektif mengenai kapasitas fiskal daerah. Hasil evaluasi tersebut tidak hanya membantu pemerintah dalam menilai pencapaian selama tahun anggaran 2020–2023, tetapi juga menjadi fondasi dalam merancang strategi peningkatan kemandirian fiskal dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menitikberatkan pada analisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam periode anggaran 2020–2023 dengan memanfaatkan tiga indikator pokok, yakni Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Rasio Derajat Desentralisasi

Fiskal. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi keuangan daerah melalui data numerik yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Semua data penelitian bersifat sekunder, yang diunduh dari portal resmi DJPK Kementerian Keuangan, serta didukung oleh dokumen APBD dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, karena penelitian tidak memerlukan data primer seperti wawancara atau pengamatan. Unit analisis penelitian adalah data keuangan Provinsi Kalimantan Tengah selama empat tahun anggaran, tanpa melibatkan populasi atau sampel.

Untuk mendukung analisis, penelitian ini menetapkan definisi operasional berdasarkan tiga rasio keuangan tersebut yang diperlakukan sebagai variabel terukur dalam penelitian deskriptif. Model penelitian disusun untuk menggambarkan alur analisis, mulai dari pengumpulan data LRA tahun 2020–2023, perhitungan ketiga rasio keuangan, pengklasifikasian hasil rasio sesuai standar evaluasi kinerja keuangan daerah, hingga tahap interpretasi untuk memberikan gambaran tentang tingkat kemandirian fiskal, efektivitas PAD, dan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Model ini berperan sebagai kerangka kerja analitis yang memandu proses penelitian dari awal sampai akhir dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara terstruktur. Dalam memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, alat dan analisis yang digunakan adalah Analisis Kinerja Pengelolaan APBD, yang terdiri dari:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung berdasarkan perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan transfer yang diterima pemerintah daerah. Semakin tinggi rasionya, semakin mandiri daerah dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Keterangan:

RKKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 1. Kriteria Penilaian Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Percentase	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0% – 25%	Sangat Kurang / Rendah Sekali	Instruktif (Daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah, peranan Pemerintah pusat lebih dominan).
25% – 50%	Kurang / Rendah	Konsultatif (Daerah yang kurang mampu melaksanakan otonomi, campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang).

50% - 75%	Sedang / Cukup	Partisipatif (Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi, peranan pemerintah semakin berkurang).
75% - 100%	Baik / Tinggi	Delegatif (Daerah yang benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada).

Sumber: Litbang Depdagri-Fisipol UGM (Munir Dasril dkk, 2004:49)

1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan. Analisis rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{REPAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Keterangan:

REPAD = Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 2. Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas PAD

Presentase	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0% - 10%	Sangat Kurang
10,01% - 20%	Kurang
20,01% - 30%	Sedang/Cukup
30,01% - 40%	Cukup Baik
40,01% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio ini menunjukkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar kontribusi PAD, semakin tinggi kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi fiskal. Adapun rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{RDDF} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Penilaian Rasio Derajat Desentralisasi

Fiskal Presentase	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0% - 10%	Sangat Kurang
10,01% - 20%	Kurang
20,01% - 30%	Sedang/Cukup
30,01% - 40%	Cukup Baik
40,01% - 50%	Baik

> 50%	Sangat Baik
Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (1991)	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam kajian ilmiah ini berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 2020-2023. Data tersebut diperoleh dari situs resmi <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. Berikut adalah elemen-elemen yang digunakan penulis dalam menghitung tiga variabel metode rasio.

Hasil penghitungan ketiga rasio tersebut menyediakan gambaran tentang kemampuan fiskal, efektivitas penanganan pemasukan daerah, serta kapasitas daerah dalam melaksanakan otonomi fiskal. Secara keseluruhan, ketiga indikator menunjukkan kecenderungan naik, khususnya setelah periode tekanan fiskal akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

Tabel 4. Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2023 (Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Keterangan	Anggaran	Realisasi
2020	Pendapatan Daerah	4.816.639.952.634,00	4.767.014.514.749,00
	PAD	1.485.940.751.841,00	1.570.137.570.176,27
	Pendapatan Transfer	3.311.575.490.793,00	3.170.347.450.809,00
2021	Pendapatan Daerah	4.724.881.114.687,00	5.199.634.633.666,73
	PAD	1.702.147.360.687,00	1.851.575.071.028,73
	Pendapatan Transfer	3.021.218.558.000,00	3.312.603.775.771,00
2022	Pendapatan Daerah	5.254.492.354.497,00	5.466.828.340.418,07
	PAD	2.331.982.322.341,00	2.523.597.744.203,57
	Pendapatan Transfer	2.905.502.267.292,00	2.930.695.230.475,00
2023	Pendapatan Daerah	6.600.636.578.960,00	6.730.216.813.007,10
	PAD	2.432.221.262.954,00	2.589.901.319.397,60
	Pendapatan Tranfer	4.162.509.738.209,00	4.127.977.388.415,00

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan Tabel 4, data pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode anggaran 2020–2023 menunjukkan tren perkembangan yang tidak stabil dan menggambarkan tingkat ketergantungan fiskal yang cukup besar terhadap pemerintah pusat. Pada 2020, realisasi pendapatan daerah tercatat Rp4,76 triliun, yang kemudian meningkat menjadi Rp5,19 triliun di 2021, naik lagi ke Rp5,46 triliun di 2022, dan mencapai Rp6,73 triliun di 2023. Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh pendapatan transfer, sementara kontribusi PAD relatif kecil meskipun mengalami kenaikan dari Rp1,48 triliun pada 2020 menjadi Rp2,58 triliun pada 2023. Ketergantungan yang tinggi pada pendapatan transfer ini menandakan bahwa kemampuan kemandirian fiskal Provinsi Kalimantan Tengah masih terbatas, sehingga kapasitas daerah untuk mendanai layanan dan pembangunan secara independen belum sepenuhnya memadai.

Tabel 5. Data Laporan Realisasai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi kalimantan Tengah tahun 2020-2023 (Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Keterangan	Anggaran	Realisasi
2020	Belanja	4.772.120.280.347,21	4.466.805.961.013,31
	Belanja Operasi	3.400.772.364.031,77	3.172.105.602.013,78
	Belanja Modal	1.155.327.868.741,35	1.108.301.881.143,53
	Surplus/(Defisit)	(611.326.980.587,84)	(264.010.282.308,32)
2021	Belanja	4.941.216.245.078,00	4.584.753.691.272,38
	Belanja Operasi	3.177.520.803.407,00	2.967.377.836.187,83
	Belanja Modal	913.076.407.456,00	872.467.667.935,12
	Surplus/(Defisit)	(924.261.472.264,00)	(61.847.177.085,08)
2022	Belanja	5.875.128.710.590,00	5.147.570.980.714,33
	Belanja Operasi	3.444.933.694.552,00	2.925.693.849.067,49
	Belanja Modal	1.189.690.359.863,00	1.091.793.384.959,01
	Surplus/(Defisit)	(870.826.316.900,00)	219.352.919.276,74
2023	Belanja	7.309.930.294.756,00	6.326.371.485.915,40
	Belanja Operasi	4.024.214.898.552,00	3.412.541.268.044,40
	Belanja Modal	1.780.034.382.438,00	1.537.607.579.233,00
	Surplus/(Defisit)	(2.624.270.368.483,00)	(961.170.229.957,90)

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Pada sisi belanja, tabel 5. menunjukkan bahwa total Belanja Daerah terus meningkat dari Rp4,46 triliun pada 2020 menjadi Rp6,32 triliun pada 2023 dalam realisasi. Belanja operasi masih mendominasi pengeluaran daerah, sementara belanja modal relatif lebih kecil. Kondisi ini menunjukkan fokus anggaran yang lebih besar pada kebutuhan rutin dibandingkan investasi pembangunan. Selain itu, posisi surplus/defisit daerah mengalami fluktuasi signifikan: defisit di tahun 2020 dan 2021, surplus pada 2022, kemudian kembali defisit besar pada 2023 sebesar Rp(961 miliar). Fluktuasi ini menggambarkan tekanan fiskal yang cukup berat bagi Kalimantan Tengah.

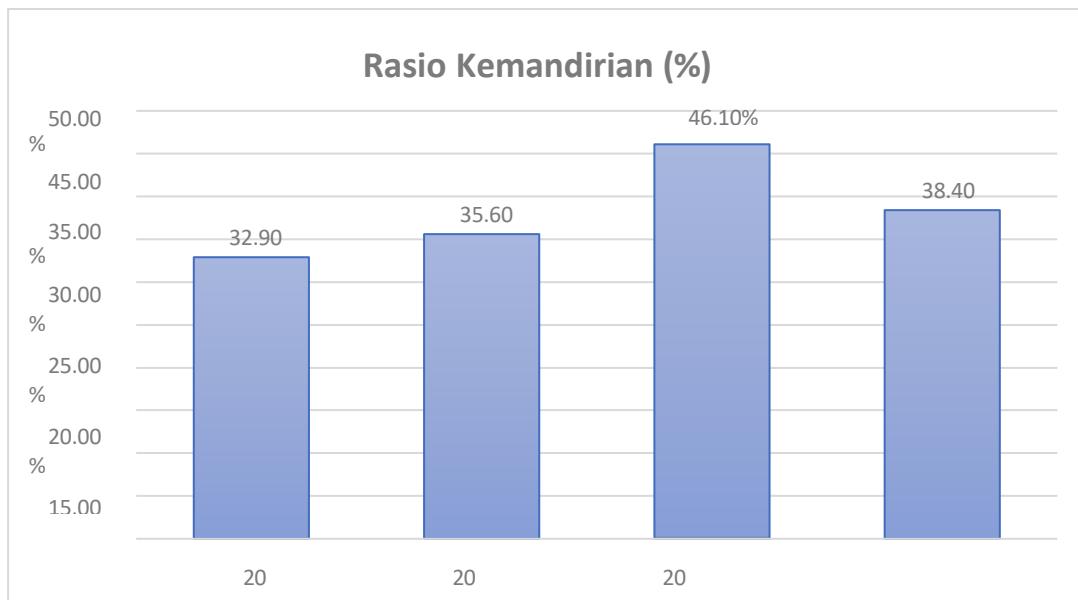
Pembahasan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 6. Interpretasi Rasio Kemandirian

Tahun	Nilai (%)	Kategori	Makna Pola Hubungan
-------	-----------	----------	---------------------

2020	49,5	Konsultatif	Daerah mulai mampu namun masih didominasi transfer pusat
2021	55,9	Partisipatif	Ketergantungan mulai menurun
2022	86,1	Delegatif	Tingkat kemandirian sangat tinggi
2023	62,7	Partisipatif	Kemampuan mandiri masih baik tetapi belum stabil

Sumber: Data Sekunder Diolah Oleh Peneliti



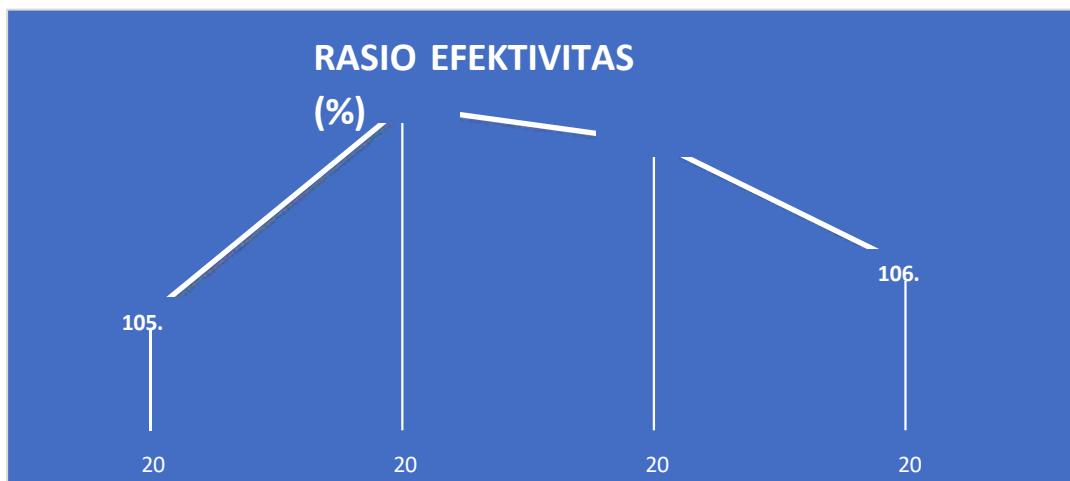
Gambar 1. Tren Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2023

Rasio kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendanai keperluan pemerintahan dan pembangunan menggunakan PAD tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat. Dari 2020 hingga 2023, angka rasio ini mengalami perubahan yang tidak stabil, dimulai dari 49,5% pada 2020 yang menunjukkan ketergantungan besar terhadap pendapatan transfer, lalu naik ke 55,9% di 2021 sebagai indikasi perbaikan kemampuan daerah dalam mengeksplorasi pendapatan sendiri. Tingkat kemandirian tertinggi tercapai pada 2022 dengan 86,1%, yang mengindikasikan kapasitas daerah untuk membiayai sebagian besar pengeluaran melalui PAD seiring dengan peningkatan penerimaan pajak daerah, perbaikan administrasi, penggunaan sistem digital untuk pemungutan pajak, serta dampak pemulihan ekonomi setelah pandemi. Akan tetapi, pada 2023 rasio turun kembali ke 62,7%, meskipun masih lebih baik daripada dua tahun pertama, yang menandakan bahwa sumbangan PAD belum stabil dan masih terpengaruh oleh fluktuasi penerimaan dana transfer. Secara teoritis, situasi ini menunjukkan bahwa susunan fiskal daerah masih bergantung pada dana transfer dan belum benar-benar mandiri, sehingga langkah-langkah untuk meningkatkan kemandirian fiskal perlu diteruskan melalui pengoptimalan sumber pendapatan, penguatan BUMD, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak agar bagian PAD terhadap total pendapatan daerah bisa naik secara berkelanjutan di masa mendatang.

Pembahasan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas PAD dipakai untuk menilai seberapa jauh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat mencapai target PAD yang telah ditentukan dalam APBD setiap tahun, di mana nilai rasio yang lebih tinggi berarti kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan mengumpulkan pendapatan asli daerah semakin baik. Dari hasil penghitungan, rasio efektivitas menunjukkan angka yang

sangat memuaskan selama masa penelitian, bahkan realisasi PAD tercatat melampaui target anggaran pada beberapa tahun. Namun, untuk keperluan pelaporan resmi, nilai efektivitas tersebut dibatasi maksimal 100% sesuai dengan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa kategori efektivitas tertinggi adalah $\geq 100\%$ dengan klasifikasi "Sangat Efektif".



Gambar 2. Grafik Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (Data Pelaporan)

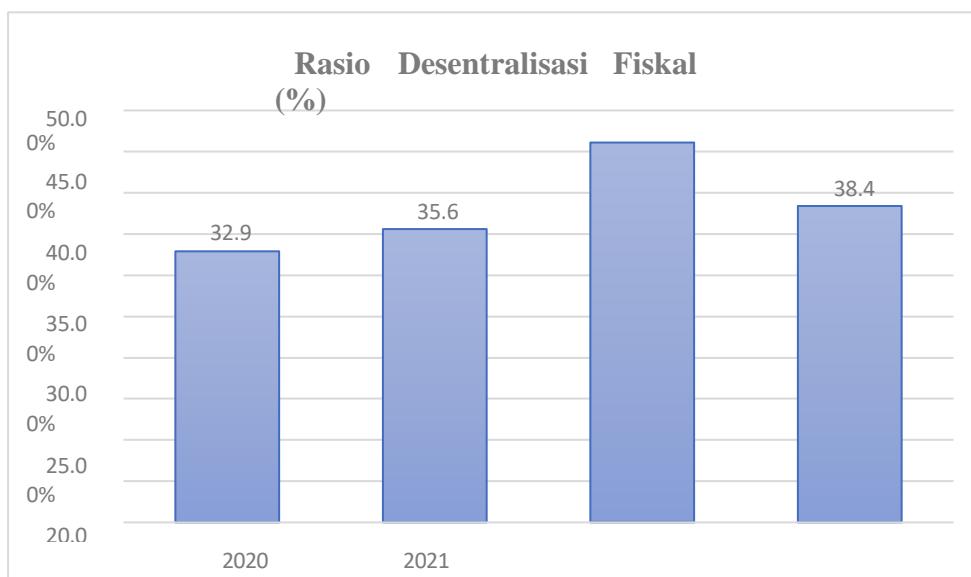
Dari hasil penelitian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperlihatkan performa yang sangat memuaskan dalam menangani Pendapatan Asli Daerah, di mana walaupun angka penghitungan sebenarnya melampaui 100%, laporan resmi tetap memakai batas tertinggi 100% sesuai aturan perundang-undangan, sehingga mengonfirmasi bahwa sasaran PAD yang ditentukan oleh pemerintah daerah berhasil dicapai bahkan dilampaui secara berkelanjutan sepanjang masa studi. Prestasi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan dan pengumpulan PAD telah berlangsung dengan efisien berkat peningkatan kepatuhan pembayar pajak, implementasi teknologi digital seperti e-Samsat dan fasilitas pembayaran elektronik, serta pemulihan kegiatan ekonomi setelah pandemi. Rasio efektivitas di atas 100% menandai pencapaian fiskal berlebih di mana realisasi penerimaan melebihi rencana yang direncanakan (Mahmudi 2016). Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dianggap memiliki performa sangat baik dalam pengumpulan PAD, sedangkan tantangan mendatang adalah memastikan penentuan sasaran PAD yang lebih sesuai dengan potensi nyata agar penilaian kinerja fiskal menjadi lebih seimbang.

Pembahasan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 7. Pembahasan Rasio Desentralisasi Fiskal

Tahun	Nilai (%)	Kategori	Makna
2020	32,9	Cukup Tinggi	Ketergantungan masih signifikan

2021	35,6	Cukup Tinggi	PAD mulai meningkat
2022	46,1	Tinggi	Kontribusi PAD membaik
2023	38,4	Cukup Tinggi	Stabil namun belum optimal



Gambar 3. Tren Rasio Desentralisasi Fiskal

Data dari tabel dan gambar tersebut mengindikasikan bahwa bagian PAD dalam total pendapatan daerah mengalami perubahan tiap tahun, di mana pada 2020 rasio derajat desentralisasi fiskal berada di level 32,9% dan masuk kategori "Sedang", yang menandakan bahwa penerimaan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, lalu naik menjadi 35,6% di 2021 yang menunjukkan perbaikan awal kemampuan daerah untuk menambah proporsi PAD dalam komposisi pendapatan. Kenaikan paling mencolok terjadi pada 2022 dengan angka 46,1% yang termasuk kategori "Tinggi", yang berarti hampir separuh pendapatan daerah berasal dari PAD dan menunjukkan peralihan ke arah kemandirian fiskal, tetapi pada 2023 angka tersebut turun lagi ke 38,4% meskipun tetap dalam kategori sedang, yang menandakan bahwa laju pertumbuhan pendapatan transfer lebih cepat daripada pertumbuhan PAD. Jika dihubungkan dengan indikator rasio kemandirian dan efektivitas PAD, temuan ini menunjukkan bahwa walaupun PAD berhasil dikumpulkan dengan rasio efektivitas 100%, kontribusinya terhadap total pendapatan belum mendominasi sehingga efektivitas yang tinggi belum bisa meningkatkan bagian PAD secara berarti dalam susunan pendapatan daerah. Besarnya pendapatan transfer juga bisa menciptakan ketergantungan fiskal sehingga daerah kurang termotivasi untuk mengeksplorasi sumber pendapatan sendiri (Mahmudi 2016), dan meskipun PAD bertambah serta dikumpulkan secara efektif, kontribusinya masih terhalangi oleh volume transfer pusat yang besar (Chandra dkk., 2025). Dengan demikian, analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kecenderungan

peningkatan kapasitas fiskal, namun bagian PAD terhadap total pendapatan daerah masih perlu ditingkatkan agar implementasi otonomi daerah bisa berjalan lebih optimal dan lestari.

SIMPULAN

Dari hasil evaluasi performa keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2020 sampai 2023 menggunakan tiga indikator utama, dapat disimpulkan bahwa pencapaian performa keuangan daerah menampilkan gambaran yang positif namun masih meninggalkan beberapa tantangan pokok untuk memperkuat otonomi fiskal. Di satu pihak, daerah ini telah menunjukkan kemampuan yang sangat memuaskan dalam aspek efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana realisasi penerimaannya secara terus-menerus mencapai atau bahkan melebihi sasaran yang ditentukan dalam APBD setiap tahun. Prestasi efektivitas sebesar 100% atau lebih ini menandakan bahwa proses perencanaan fiskal, pengumpulan pajak dan retribusi, serta dukungan sistem dan teknologi layanan pembayaran telah beroperasi dengan baik. Keberhasilan ini menjadi dasar penting untuk perkembangan fiskal daerah di masa depan. Namun di pihak lain, dua indikator lainnya mengungkapkan bahwa keberhasilan dalam efektivitas pengumpulan belum sepenuhnya bisa mengubah pola ketergantungan keuangan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah, meskipun menunjukkan kecenderungan naik, masih bersifat tidak stabil dan belum mantap. Ketidakstabilan ini terlihat dari perubahan kategori rasio yang bolak-balik antara kategori partisipatif dan delegatif dalam empat tahun itu, yang pada dasarnya menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendanaan penyelenggaraan pemerintahan belum cukup solid. Begitu pula dengan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, yang mengukur seberapa besar PAD mendominasi total pendapatan daerah, masih dalam kategori sedang. Fakta bahwa kontribusi PAD sempat masuk kategori tinggi hanya pada tahun 2022 lalu turun kembali, memperkuat bahwa sumber pendapatan daerah masih sangat bertopang pada transfer dari pemerintah pusat, baik Dana Perimbangan maupun Dana Transfer lainnya. Oleh karena itu, seluruh temuan studi ini menggambarkan sebuah dilema: di tengah keberhasilan operasional dalam mengumpulkan potensi pendapatan yang direncanakan, kemandirian fiskal secara mendasar masih merupakan tugas besar yang belum selesai. Performa keuangan yang baik dari segi efektivitas perlu diubah menjadi peningkatan signifikan dalam kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Hal ini memerlukan bukan hanya usaha mempertahankan efektivitas pengumpulan, tetapi lebih pada strategi ekspansif untuk memperluas basis dan sumber PAD yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, untuk mencapai otonomi daerah yang lebih maksimal dan mandiri, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu fokus pada penguatan struktur pendapatan, diversifikasi sumber PAD, dan inovasi kebijakan fiskal daerah yang dapat mengurangi ketergantungan tradisional pada transfer pusat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2020-2023*. Palangka Raya: BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Febriyanti, R. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan rasio keuangan. *Jurnal Akuntansi Publik*, 9(2), 115-128.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (1996). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang evaluasi kinerja keuangan daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (2024). *Dokumen APBD dan realisasi keuangan tahun anggaran 2020-2023*. Palangka Raya: Biro Keuangan Daerah.
- Putri, A., Sari, P., & Rahman, D. (2025). *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020-2023*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.